

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku**

- BN. Marbun, 2006, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kette Soleman, “Bahan A  
jar Hukum Acara Perdata”
- Riwanto Agus, 2016, Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia,  
Thafa Media
- Soerjono Soekanto & Srimamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Raja  
Grafindo Persada
- Yulia, 2018, “Hukum Acara Perdata” Unimal Press

### **Sumber Jurnal**

- Basuki udiyo, “dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di  
indonesia perspektif demokrasi”, jurnal kosmik hukum, volume 20, nomor  
2, 2020
- Chandra lesmana, karim suryadi, anggraeni, “partai politik sebagai utilitas politik  
dalam demokrasi di indonesia”, jurnal of social sciences and politics, volume  
8, nomor 1, oktober 2021
- Farida rida, “mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan  
implikasinya dalam konsep perwakilan rakyat”, jurnal cita hukum, volume 1,  
nomor 2, desember 2013
- Hastuti mei, nuriyatman, “pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi  
konstituen di perlemen”, the republic journal of law, volume.02,  
nomor.2 oktober 2024

Ilhamsyah muhammad, lestari febi, silfa N, jihadi ganez, “kontroversi mekanisme PAW anggota DPR terhadap kedaulatan rakyat: tinjauan sosiologi politik,” jurnal hukum dan kewarganegaraan, volume 9, nomor.4, 2024

Kurniawan, M. B. 2018. Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Saifulloh Ahmad Perdana Putra, “politik hukum peraturan organisasi sayap partai politik dalam hukum positif indonesia” jurnal lainpurokerto, volume 3, nomor 2, desember 2020

Tua dalimunthe, “partai dan pemilu”, jurnal komunikasi dan dakwan, volume 1, nomor1 2023

### **Link**

Rilisan KPU PAPUAPEGUNUNGAN, “Penggantian Antar Waktu”, sabtu 25 oktober 2025 18:18, [pauapegunungan.kpu.go.id](http://pauapegunungan.kpu.go.id)

### **Undang-undang**

1. Kitab undang-undang hukum perdata
2. Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
3. Undang-undang nomor.7 tahun 2011 tentang pemilihan umum

### **Putusan Pengadilan**

1. Putusan Pengadilan Negara Labuanbajo Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
3. Putusan peninjauan kembali nomor 156 pk/pdt.sus-parpol/2018
4. Putusan pengadilan negeri Magetan Nomor 35/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mgt